

Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Indonesia dalam Menghadapi Era Digital

Zahro Rohmatin^{1*}, Alif M Taufiq², Naeli Anggi Nurmadina³, Rafi Rizqullah⁴,
Hamdi Abdullah Hasibuan⁵

^{1,2,3,4,5}Department of Education and Teacher Training, Universitas Riau,
Pekanbaru, Indonesia

Alamat : Kampus Binawidya, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292

Korespondensi penulis: zahro.rohmatin3831@student.unri.ac.id*

Abstract. Democracy education in the digital era is an important effort to strengthen democratic values and increase active participation in political life. In the digital era, information and communication technology has facilitated the quick and easy dissemination of information, thereby increasing citizens' ability to influence government policy. However, challenges such as disinformation and online polarization also arise, so collective efforts need to be made to strengthen digital democracy. Using digital technology wisely is also important. Increasing digital literacy so that people can identify fake news, understand social media algorithms, and protect online privacy is a significant first step. Strong regulation is also needed to ensure that algorithms and business practices do not support the spread of disinformation or exacerbate polarization. With good democratic education and smart use of digital technology, hopes are high that digital democracy can deepen democratic engagement, not reduce it. This article will discuss how democratic education can increase community participation and strengthen democratic values in the digital era

Keywords: Democratic Education, Pancasila Democracy, Digital Era

Abstrak. Pendidikan demokrasi di era digital merupakan upaya penting untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan memperkuat nilai-nilai demokrasi. Dalam era serba digital, informasi serta komunikasi memberikan fasilitas pada penyebaran informasi yang cepat dan mudah, sehingga meningkatkan kemampuan warga negara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun, tantangan-tantangan seperti disinformasi dan polarisasi online juga timbul, sehingga perlu dilakukan upaya kolektif untuk memperkuat demokrasi digital. Menggunakan teknologi digital secara bijak juga menjadi penting. Meningkatkan literasi digital agar masyarakat bisa mengidentifikasi berita palsu, memahami algoritma media sosial, dan melindungi privasi online adalah langkah awal yang signifikan. Regulasi yang kuat juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa algoritma dan praktik bisnis tidak mendukung penyebaran disinformasi atau memperburuk polarisasi. Dengan pendidikan demokrasi yang baik dan penggunaan teknologi digital yang cerdas, harapan besar bahwa demokrasi digital dapat memperdalam keterlibatan demokrasi, bukan mengurangnya. Artikel ini akan membahas tentang bagaimana pendidikan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di era digital.

Kata kunci: Pendidikan Demokrasi, Demokrasi Pancasila, Era digital

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan demokrasi di era digital merupakan subjek yang semakin relevan dan kompleks dalam konteks modern. Era digital telah membawa banyak transformasi dalam komunikasi, partisipasi politik, dan akses informasi. Pendidikan demokrasi harus dimulai dari sekolah dan diteruskan hingga masyarakat. Pendidikan demokrasi di sekolah harus meliputi materi-materi dasar demokrasi seperti kebebasan berekspresi, kesetaraan, hak asasi manusia dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik (Hutabarat et al., 2021). Peserta didik harus diajarkan tentang proses demokrasi, seperti pemungutan suara, pemilihan umum dan partisipasi dalam debat dan diskusi. Pendidikan demokrasi di era digital

semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara kita berpartisipasi dalam kehidupan politik, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Dalam konteks ini, masyarakat dihadapkan pada tantangan baru seperti disinformasi, polarisasi online, serta tantangan terhadap keamanan data dan privasi. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi harus diintegrasikan dengan literasi digital untuk membantu individu memahami dan mengevaluasi informasi yang mereka terima (Habe & Ahiruddin, 2017).

Pendidikan demokrasi di era digital merupakan subjek yang semakin relevan dan kompleks dalam konteks modern. Era digital telah membawa banyak transformasi dalam komunikasi, partisipasi politik, dan akses informasi. Melalui pendidikan demokrasi yang baik, kita dapat memperkuat nilai-nilai demokratis seperti, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian, demokrasi digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperdalam keterlibatan demokrasi, bukan menguranginya. Kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran tentang demokrasi. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan kesadaran dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis di era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendidikan demokrasi di Indonesia sangat penting untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Era digital tidak hanya membawa kemudahan akses informasi, tetapi juga memunculkan berbagai masalah seperti penyebaran hoaks, polarisasi masyarakat, dan ancaman terhadap privasi individu. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi harus diadaptasi agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi serta keterampilan kritis yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Dengan memperkuat literasi digital dan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, masyarakat dapat lebih siap untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat fondasi demokrasi Pancasila tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis di tengah dinamika perubahan teknologi yang cepat.

3. METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam artikel ini ialah dengan melakukan telaah pustaka dan analisis data sekunder dari berbagai sumber seperti sumber akademis, dokumen sejarah, dan temuan penelitian sebelumnya. Harapannya, pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang luas tentang peran Demokrasi Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Demokrasi

Pendidikan ialah sarana guna membangun dan mengaktifkan nilai sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai kompetensi sosial dan pengembangan pribadi serta membina hubungan yang kokoh antara individu, masyarakat, dan lingkungan sekitar tempat ia tinggal. Dengan kata lain, pendidikan ialah suatu proses memanusiakan manusia yang mempunyai makna bahwa individu harus dapat memahami dirinya sendiri, orang lain, serta lingkungan alam kebudayaannya. Dengan demikian, kekuasaan sebenarnya berasal dari rakyat, dan rakyatlah yang menentukan dan mengatur kehidupan Negara (Prasisko, 2019).

Demokrasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam system pemerintahan, meskipun pelaksanaannya masih berbeda-beda disetiap negara. Ini mencerminkan keputusan mayoritas yang diberikan kebebasan oleh warga negara. Demokrasi dianggap sebagai kekuasaan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Pendidikan demokratis ialah proses yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi diri manusia yang menghargai keragaman serta perbedaan sebagai hasil dari ragam budaya, etnis, dan agama. Nilai paling utama yang ditekankan dalam Pendidikan demokratis adalah kesetaraan dan toleransi (Siska et al., 2021). Pendidikan demokrasi merupakan sebuah usaha yang terencana dilakukan negara dan masyarakat agar dapat mengenal, merasakan, menerapkan, mengembangkan konsep, serta nilai demokrasi sesuai dengan status dan peran dalam masyarakat.

Pendidikan dalam sistem demokratis memiliki peran penting. Tujuan dari pendidikan ialah untuk mengajarkan warga negara mengenai nilai dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil. Sekolah berfungsi sebagai tempat proses ini

berlangsung secara resmi dan mencerminkan upaya guna mendidik warga negara menuju sebuah masyarakat sipil yang mendukung pelaksanaan demokrasi, dimulai dari lingkungan sekolah (Rizki Ramdani, 2021). Perkembangan dalam era digital juga berkembang dengan sangat cepat sehingga manusia tidak bisa berhenti mengikutinya. Ini terjadi sebab manusia pada dasarnya menginginkan sesuatu yang lebih mudah dan praktis. Dalam era digital yang terus melaju pesat, teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai segi kehidupan, termasuk dalam hal demokrasi. Kemajuan pesat dalam era digital tentunya membawa berbagai konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, telah menyebabkan akses terhadap informasi yang sebelumnya tidak pernah terjadi (Wilujeng, 2014).

Generasi digital merupakan era dimana teknologi akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengaruh industri digital pada akhirnya akan berdampak pada seluruh bidang industri. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan digital akan mampu membantu semua jenis usaha atau kegiatan baru yang dapat meningkatkan perekonomian. Meski begitu, ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui apa yang harus dilakukan dengan kemajuan dunia digital saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia juga harus bias mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa mengikuti apa yang terjadi saat ini. Era digital seperti saat ini tidak hanya memberikan manfaat saja, namun era digital juga menghadirkan tantangan tersendiri yang harus dihadapi setiap orang dalam beradaptasi dengan perkembangan saat ini.

Krisis demokrasi dalam era digital menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia. Meskipun teknologi informasi dan media sosial telah meningkatkan akses informasi dan interaksi antar individu secara global, dampak terhadap proses demokrasi juga menimbulkan tantangan serius. Krisis demokrasi di era digital menghadirkan tantangan kompleks dan unik dalam pengelolaan informasi. Era digital telah mengubah cara orang mengakses, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi secara drastis. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan akses lebih luas terhadap informasi, hal ini juga membawa risiko baru, seperti penyebaran berita palsu (hoaks), propaganda politik, dan penggunaan data pribadi untuk manipulasi politik. Salah satu tantangan utama dalam mengelola informasi di era digital adalah penyebaran berita palsu atau hoaks (Ade Wahyudi 2022).

Dengan mudahnya akses untuk membuat dan menyebarkan informasi di platform media sosial, hoaks bisa dengan cepat menyebar dan memengaruhi pendapat publik. Ini bisa mengancam integritas proses demokrasi. Selain hoaks, propaganda politik juga menjadi masalah serius dalam pengelolaan informasi di era digital. Hal ini dapat membingungkan batas antara fakta dan opini, serta memengaruhi pandangan publik terhadap isu-isu politik (Kusmanto, 2014). Demokrasi Pancasila merupakan jenis demokrasi yang secara spesifik diterapkan di Indonesia, berakar dari nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara. Konsep ini berawal dari karakter dan filosofi kehidupan masyarakat Indonesia, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam Demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat adalah aspek utama, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih fokus pada kebebasan individu serta hak asasi manusia, Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya persatuan sosial dan mencegah perpecahan antara kelompok mayoritas dan minoritas (Demokrasi & Berbangsa, 2018).

Peran Kurikulum Dalam Menerapkan Pendidikan Demokrasi di Sekolah

Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan kebutuhan pendidikan untuk memberikan kesempatan dan pengalaman kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara lebih optimal guna mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi. Proses pendidikan perlu memperhatikan tingkat perkembangan berpikir, minat, motivasi dan segala sifat yang dimiliki peserta didik. Pendidikan diyakini dapat menyediakan sarana yang diperlukan bagi keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, sosial, emosional, dan intelektual. Proses pendidikan perlu memperhatikan tingkat kematangan psikis dan fisik peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan diharapkan dapat menghasilkan hasil akademik dan non-akademik yang unggul bagi peserta didik (Giawa & Telaumbanua, 2023).

Dalam menghadapi kebutuhan serba teknologi seperti saat ini, kurikulum ditekankan agar sanggup melewati kesulitan dengan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, seperti literasi teknologi, literasi data, serta literasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam keyakinan agama. Keterampilan pembelajaran berfokus pada pengembangan proses kognitif yang dibutuhkan guna beradaptasi di lingkungan kerja saat ini. Keterampilan yang biasa dikenal dengan 9C terdiri dari: kemampuan untuk menganalisis secara kritis saat memecahkan masalah, kemampuan

untuk berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan untuk berpikir kreatif di luar norma, kemampuan untuk bekerja sama demi mencapai hasil terbaik, kemampuan dalam membuat model dan metode penyelesaian numerik, kemampuan berpikir dan melatih logika, pemahaman tentang budaya, penghargaan terhadap budaya, rasa ingin tahu, kesadaran akan pentingnya menjaga diri sendiri, orang lain, dan planet. Jenis keterampilan ini telah menjadi kebutuhan penting yang harus dicapai dalam sistem pendidikan sekarang yang sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman.

Adanya kurikulum seperti sekarang secara signifikan mendukung penyebaran pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia melalui implementasi kebijakan afirmatif yang dicanangkan oleh pemerintah untuk siswa yang berasal dari daerah 3T. Merdeka Belajar juga merubah cara pembelajaran yang sebelumnya dilakukan di dalam kelas menjadi pembelajaran di luar ruangan. Belajar di luar kelas memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan tenaga pendidik. Kegiatan pembelajaran di luar kelas akan membentuk karakter peserta didik, termasuk dalam hal berani untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi, kemampuan bersosialisasi yang baik, dan menjadikan mereka peserta didik yang kompeten. Dengan cara ini, karakter peserta didik akan berkembang.

Kurikulum Merdeka Belajar bukan hanya didasarkan pada pengetahuan dan kemampuan peserta didik yang terlihat dari nilai akademik, tetapi mempertimbangkan sikap dan keterampilan siswa dalam bidang ilmu terkait juga menjadi penilaian. Para siswa memiliki kebebasan guna mengasah bakat yang mereka miliki (Utami et al., 2023).

Tantangan Demokrasi Pancasila

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan pendidikan demokrasi di sekolah adalah penyebaran hoaks di jejaring internet. Informasi yang salah atau manipulatif bisa dengan mudah menyebar secara massal dan memengaruhi persepsi publik dan opini secara keseluruhan. Privasi Online: Teknologi digital juga membawa risiko terhadap privasi individu. Data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi dapat disalahgunakan atau diperjualbelikan tanpa izin, menyebabkan keprihatinan tentang keamanan data dan privasi online. Menurut Makagiansar (1996) pendidikan akan mengalami pergeseran perubahan paradigma pada abad 21 sebagai berikut :

- a. Dari belajar berfokus penguasaan pengetahuan ke belajar holistik,
- b. Dari konsentrasi eksklusif pada kompetisi ke orientasi kerja sama.

- c. Dari citra hubungan guru-murid yang bersifat konfrontatif ke citra hubungan kemitraan,
- d. Dari kampanye melawan buta aksara ke kampanye melawan buai teknologi, budaya, dan komputer,
- e. Dari pengajar yang menekankan pengetahuan skolastik (akademik) ke penekanan keseimbangan fokus pendidikan nilai,
- f. Dari belajar terminal ke belajar sepanjang hayat,
- g. Dari penampilan guru yang terisolasi ke penampilan dalam tim kerja.

Jika kita menyimak pendapat para ahli, nampaknya dunia pendidikan dihadapkan pada tugas membina talenta-talenta yang berkualitas dalam menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan persaingan. Arus perkembangan di zaman globalisasi sangat pesat dalam banyak aspek kehidupan manusia. Terutama dalam bidang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan era digital dan membuat masyarakat menjadi bergantung pada teknologi digital, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus memakai digital. Menjadi warga negara digital kini merupakan hal yang lebih krusial.

Oleh karena itu, pendidikan memiliki beberapa fitur utama untuk mengubah siswa menjadi warga digital untuk mencapai tujuan kewarganegaraan digital abad ke-21. Faktor-faktor kunci ini pembelajaran siswa dan prestasi akademik, lingkungan siswa dan perilaku siswa, kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Isman dan Gungorem (2014: 73-74) memilah sembilan bidang perilaku untuk membentuk kewarganegaraan digital. Era ini yang orang-orang harus memiliki prestasi kewarganegaraan digital, pendidikan dan siswa penting untuk melakukan hal ini. Oleh sebab itu capaian dari penulisan artikel ini ialah guna mengembangkan skala tentang kewarganegaraan digital berdasarkan sembilan titik kontak untuk menganalisis peserta didik(Saqinah Aifi Kirmala et al., 2024).

Dalam dunia pendidikan, pembelajaran berbasis TIK menjadi tantangan yang mampu dihadapi pendidik, terutama para guru. Teknologi tidak hanya diciptakan sebagai alat permainan atau gadget, tetapi sebagai sarana yang memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dan akhirnya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta menjadi media pendidikan bagi masyarakat(Ardiana Bulan Ramadhani et al., 2024).

Tantangan guru dalam pendidikan demokratis di Era Digitalisasi

Di era pendidikan serba memanfaatkan teknologi seperti saat ini, keberadaan tenaga pengajar tidak lagi dilihat sebagai sosok yang memiliki wibawa, tetapi kemampuan seorang tenaga pendidik untuk mampu beradaptasi serta berkomunikasi terhadap kemajuan teknologi menjadi sebuah bagian dari keunggulan sebagai pengajar (Ilyasir, 2020). Tenaga pendidik saat ini dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif karena metode pengajaran tradisional sudah tidak lagi sejalan dengan kondisi peserta didik masa kini. Pengembangan dan peningkatan kemampuan pribadi juga sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Perubahan ini mempengaruhi dunia pendidikan, mulai dari cara memahami pengetahuan hingga metode yang tepat guna menyampaikan pengetahuan dan keterampilan itu dalam proses belajar, baik di dalam ataupun di luar Sekolah. Selain itu, pergeseran tempat belajar, yaitu peralihan dari era bertatap muka secara analog ke era digital yang tidak mengharuskan hal itu, juga dianggap signifikan (Fitroh & Rosidi, 2024).

Kemajuan dan tuntutan perkembangan TIK mempengaruhi pendidik dan bagaimana kompetensi mereka harus berorientasi pada perkembangan teknologi informasi komunikasi dan masyarakat digital saat ini. Di sisi lain, guru tetap bisa menjalankan proses pendidikan secara demokratis. Sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran berbasis TIK, guru semakin meningkatkan dirinya sebagai pemberi dorongan dan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan dan menguasai hasil pembelajaran yang telah ditentukan, selain meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya dalam mengembangkan alternatif solusi. pendidik juga senantiasa mendorong peserta didik untuk terus memperdalam dan mengembangkan pelajaran sepanjang perkuliahan (Uriawan & Alamsyah, 2024).

Di sisi lain, para pendidik harus memahami bahwa siswa sekarang tidak hanya bergantung pada buku teks dan memiliki kemampuan untuk menggali materi pelajaran lebih dalam dengan bantuan internet. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran telah menjadi kebutuhan pendidikan di masa kini dan masa mendatang. Guru perlu mengubah cara berpikir dan tindakan siswa agar mereka menjadi individu yang lebih baik, beretika, bermoral, dan demokratis. Maka, peran guru tidak hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, tetapi juga berusaha membangun budaya belajar yang dapat membantu membentuk karakter siswa sebagai anggota masyarakat demokratis (Prabowo, 2023).

Peluang Pendidikan Demokrasi Di Era Digital

a. Peningkatan Literasi Digital

Literasi digital ialah kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Masyarakat perlu dilatih untuk mengenali berita palsu, memahami algoritma media sosial, dan melindungi privasi online. Pendidikan ini akan membantu individu membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi akurat, serta melindungi diri dari manipulasi informasi yang merugikan. Pendidikan yang baik tentang kewarganegaraan demokratis harus diberikan kepada masyarakat agar mereka memahami nilai-nilai demokrasi dan cara memanfaatkan teknologi untuk memperkuat demokrasi (Bowen et al., 2013).

b. Memperkuat Institusi Demokrasi

Modernisasi Sistem Pemilu sangat penting untuk menjamin keamanan dan integritas pemungutan suara elektronik serta memperkuat institusi pengawasan untuk mengatasi tantangan digital. Ini akan membantu memastikan bahwa teknologi mendukung keterlibatan demokratis (Rizka Wulandari et al., 2023).

c. Mendorong Partisipasi Politik yang Inklusif

Menciptakan platform yang dirancang untuk dialog sehat dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam diskusi public. Mengorganisir kampanye politik yang mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab dan hak masyarakat sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu dan proses politik lainnya (Pebriani et al., 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendidikan demokrasi di era digital merupakan elemen penting guna meningkatkan partisipasi aktif dan memperkuat nilai-nilai demokrasi masyarakat dalam kehidupan politik. Dalam konteks yang semakin kompleks dengan kemajuan teknologi informasi, pendidikan demokrasi harus diintegrasikan dengan literasi digital untuk membantu individu mengenali disinformasi dan memahami algoritma media sosial. Krisis demokrasi yang dihadapi saat ini, seperti penyebaran berita palsu dan polarisasi online, menuntut adanya upaya kolektif dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi. Melalui pendekatan yang

komprehensif dan kolaboratif, diharapkan pendidikan demokrasi dapat menjadi sarana untuk memperdalam keterlibatan masyarakat dalam proses demokratis.

Saran

Peningkatan Literasi Digital Program pendidikan literasi digital perlu diperkuat agar masyarakat mampu mengenali dan menangkal disinformasi serta memahami penggunaan teknologi secara bijak. Pengembangan Kurikulum, Kurikulum pendidikan harus mencakup materi yang mendukung pemahaman tentang demokrasi dan partisipasi politik, serta mengintegrasikan pengalaman praktis dalam proses pembelajaran. Pengawasan dan Regulasi diperlukan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa platform digital tidak menyebarkan disinformasi dan melindungi privasi pengguna. Keterlibatan Masyarakat, Masyarakat harus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi publik serta proses pengambilan keputusan, baik secara online maupun offline, guna memperkuat demokrasi. Kolaborasi, Terciptanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sangat krusial untuk membangun suasana yang mendukung pendidikan demokrasi.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan pendidikan demokrasi dapat lebih efisien dalam menghadapi tantangan di era digital dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Wahyudi, A., Ade Tegar, A., Arifandi, B., Pratama, B., Raihanda, R., Musdanil, R., Wanda, R., Maulana, R., Satria, T., Yogi, Z., & Zikri, Z. (2022). Pendidikan demokrasi. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 01(5), 230–235.
- Ardiana Bulan Ramadhani, F., Halizah, F. N., Untari, H., Anggraini, M. S., Kristina, M. A., & Puspita, A. M. I. (2024). Transformasi Pancasila di era digital: Peluang dan tantangan. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 153–157. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3757>
- Bowen, W. G., Delbanco, A., Gardner, H., Hennessy, J. L., & Koller, D. (2013). Higher education in the digital age. In *Higher Education in the Digital Age* (pp. 628–638). <https://doi.org/10.1515/9781400866137>
- Demokrasi, A., & Berbangsa, K. (2018). Aktualisasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *March 2016*. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2815>
- Fitroh, I., & Rosidi, M. I. (2024). Harmoni nilai-nilai Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. *Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 15(2), 246–254.

- Giawa, S., & Telaumbanua, A. (2023). Urgensi kecerdasan emosional dalam menerapkan model pembelajaran demokratis oleh guru di era digital. *TEVUNAH: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(2), 115–136. <https://doi.org/10.59361/tevunah.v1i2.9>
- Habe, H., & Ahiruddin, A. (2017). Sistem pendidikan nasional. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 39–45. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>
- Hutabarat, D. T. H., Sinta, N., Dwiva, N. A., Raihandi, M. A., Ardiansyah, A., Febrian, S., & Akbar, G. (2021). Memahami makna demokrasi dalam pendidikan demokrasi. *Romeo: Review of Multidisciplinary Education, Culture and Pedagogy*, 1(1), 103–109. <https://doi.org/10.55047/romeo.v1i1.60>
- Ilyasir, F. (2020). Pendidikan demokratis di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 7(1), 60–69. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v7i1.25998>
- Kusmanto, H. (2014). Public participation in political democracy. *Journal of Government and Social Political Science*, 2(1), 78–90. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Pebriani, Y. N., Dewi, D. A., Furnamasari, Y. F., Studi, P., Guru, P., Dasar, S., & Pendidikan, U. (2021). Pendidikan kewarganegaraan bagi siswa dalam perubahan sosial di masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8811–8815.
- Prabowo, N. (2023). Urgensi pendidikan demokrasi dalam peningkatan partisipasi masyarakat. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 865–871. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.311>
- Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia dalam masyarakat multikultural. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.01.1>
- Rizka Wulandari, Z., Azzahra, N., Wulandari, P., Santoso, G., & Muhammadiyah Jakarta, U. (2023). Memperkuat jiwa kewarganegaraan di era digital dengan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 2415–2424.
- Rizki Ramdani, D. A. D. (2021). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA*, 5(3), 9034–9038. <https://jurnal.stkippgritrenggalek.ac.id/index.php/dewantara/article/view/102%0Ahttps://jurnal.stkippgritrenggalek.ac.id/index.php/dewantara/article/download/102/66>
- Saqinah Aifi Kirmala, A., Nia, A. E., Surbakti, A. R., Ginting, S., & Yunita, S. (2024). Membangun kesadaran siswa tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan di era digital. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 162–170. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1508>
- Siska, Y., Yufiarti, Y., & Japar, M. (2021). Nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. *Journal of Elementary School Education (JOuESE)*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.52657/jouese.v1i1.1324>

- Uriawan, W., & Alamsyah, M. (2024). Sistem informasi pada penerapan demokrasi pendidikan: Tantangan dan peluang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 10(2), 530–536. <https://doi.org/10.31949/educatio.v10i2.8807>
- Utami, A., Rukiyati, & Prabowo, M. (2023). Internalisasi filsafat Pancasila melalui profil pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Paris Langkis*, 3(2), 119–128. <https://doi.org/10.37304/paris.v3i2.8310>
- Wilujeng, S. R. (2014). Meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa. *Media Neliti*, 19(1), 145–157. <https://media.neliti.com/media/publications/5080-ID-meningkatkan-kualitas-kehidupan-berbangsa-melalui-budaya-demokrasi.pdf>